

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menyajikan secara berurutan beberapa kesimpulan, implikasi teoretik, serta saran penelitian lanjutan. Kesimpulan yang mengacu pada permasalahan yang diajukan, ditarik berdasarkan seluruh temuan dan pembahasan temuan penelitian. Implikasi teoretik diidentifikasi berdasarkan hasil diskusi antara temuan penelitian dengan berbagai konsep, teori dan temuan penelitian terdahulu. Implikasi praktik dikembangkan berdasarkan kebutuhan mendesak bagi perbaikan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Saran-saran kajian lanjutan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan untuk membangun, menguji, dan menghaluskan konsep dan teori yang lebih komprehensif tentang politik nepotisme.

A. Kesimpulan

Penelitian korupsi politik daerah, yang mengkaji jejaring politik, politik nepotisme dan perlawanan rakyat dalam pemilihan kepala daerah ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, para aktor politik nepotisme daerah membangun jejaring politik dengan melibatkan aktor individual, yang terdiri dari unsur elit politik daerah dan unsur elit ekonomi daerah, dan aktor kolektiva, yang terdiri dari unsur organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan yang diprakarsai oleh pemerintah. Perilaku kekuasaan elit politik daerah, yang berafiliasi dengan *Nepotis* dan *Nepos*, menunjukkan ciri-ciri kekuasaan koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkhis, yang mengakibatkan terjadinya

disafeksi politik temporer masyarakat, dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme masyarakat terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah, sehingga semakin meleluaskan para aktor menjalankan praktik politik nepotisme yang bertujuan agar *Nepos* memperoleh keunggulan dalam setiap tahapan pemenangan pemilihan kepala daerah.

Kedua, praktik politik nepotisme daerah oleh para aktor individual dan kolektiva ditujukan untuk mencapai tiga ranah tujuan, yaitu: (1) meningkatkan popularitas *Nepos* sebagai calon kepala daerah, baik melalui siasat internal maupun eksternal partai, (2) mendapatkan legalitas sebagai calon kepala daerah, baik melalui negosiasi keputusan rekomendasi pengurus pusat partai politik, yang setelah gagal melakukan negosiasi dan transaksi dengan partai politik yang bersedia mencalonkan *Nepos* sebagai kepala daerah, dan (3) meningkatkan elektabilitas *Nepos*, termasuk melalui tindak penyalahgunaan kewenangan dan sumberdaya publik oleh *Nepotis* yang masih menjabat kepala daerah.

Ketiga, praktik politik nepotisme dan tindak koruptif penyertanya, yang dilakukan terutama oleh *Nepotis* dan *Nepos*, serta sejumlah aktor politik individual dan kolektiva, mengakibatkan berbabagi perlawanan masyarakat, yang secara bertahap bergeser sejalan tingkat toleransi masyarakat, dari berbagai stigmatisasi negatif terhadap perilaku politik *Nepotis* dan *Nepos*, berbagai bentuk resistensi simbolik dan keseharian, transaksionalisasi dukungan dan pemberian suara dalam pemilihan kepada *Nepos*, dengan puncak resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-

sediaan memilih *Nepos* dan pasangannya, sehingga mengalami kekalahan mutlak dalam pemilihan kepala daerah.

Meskipun pejabat politik *Nepotis* semula memiliki pendukung sukarela mayoritas, yang karena itu berhasil memenangkan pemilihan pejabat politik daerah dan bahkan berhasil mempertahankannya pada periode kedua, ternyata menghadapi kemerosotan jumlah loyalis sukarela bagi calon kepala daerah *nepos*. Artinya, hampir tidak ada yang "gratis" dalam upaya meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan meningkatkan elektabilitasnya. Gejala dari merosotnya loyalis sukarela ini adalah dengan semakin menyempitnya atau semakin tereduksinya efek transaksional "penghargaan" yang diberikan oleh pejabat politik nepotis dan calon kepala daerah *nepos*.

Akibat lebih lanjut dari efek transaksional yang semakin menyempit, tampak jelas pada hari pelaksanaan pemungutan suara berupa resistensi elektoral. Ini ditandai dengan, misalnya, tidak berimbangannya antara "biaya politik" yang dikeluarkan oleh pejabat politik nepotis dan *neposnya* dengan perolehan dalam pemungutan suara. Pada tingkat lebih teramat pada sebuah kelurahan, misalnya, jumlah amplop berisi sejumlah uang untuk membeli suara (*vote buying*), ternyata berjumlah lebih banyak ketimbang perolehan suaranya. Artinya jelas, bahwa tidak semua warga pemilih yang menerima uang, benar-benar memilih calon kepala daerah *nepos*.

Akhirnya, sebagaimana data menunjukkan, perkembangan dari perlawanan simbolik menjadi perlawanan elektoral sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan pemerataan informasi publik yang lancar, tingkat pengetahuan dan wawasan politik

warga masyarakat, dan ketersediaan pilihan politik alternatif bagi warga masyarakat, dan tentu saja penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang memenuhi kaidah jujur dan adil, serta keterjaminan untuk memilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia, yang oleh Merton (1976) disebut sebagai prasyarat struktural demokrasi.

Secara rinci, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang dirumuskan secara proposisional sebagai berikut:

Pertama, perilaku aktor utama dalam jejaring politik nepotisme daerah yang menunjukkan ciri-ciri praktik kekuasaan koersif, hegemonik, konspiratif, dan oligarkhis, mengakibatkan disafeksi politik temporer masyarakat dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme masyarakat terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah

Kedua, praktik politik nepotisme kepala daerah dimaksudkan untuk mencapai tiga ranah tujuan yang bersifat maju bertahap sejalan proses pemilihan kepala daerah, yaitu: (1) untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah *nepos*, (2) untuk mendapatkan legalitas popularitas calon kepala daerah *nepos*, dan (3) untuk meningkatkan elektabilitas popularitas calon kepala daerah *nepos*.

Ketiga, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan popularitas calon kepala daerah *nepos* dilakukan dengan: (1) melancarkan siasat internal partai pejabat politik nepotis dan calon pejabat politik *nepos*, dan (2) melancarkan siasat eksternal partai pejabat politik nepotis dan calon kepala daerah *nepos*.

Keempat, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk mendapatkan legalitas calon kepala daerah *nepos* dilakukan dengan melakukan persuasi dan negosiasi keputusan rekomendasi pengurus pusat partai politik dimana kepala daerah selaku nepotis dan calon kepala daerah *nepos* menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Kelima, bila legalitas calon kepala daerah *nepos* melalui rekomendasi pengurus pusat partai gagal diperoleh, maka kepala daerah nepotis dan calon kepala daerah *nepos* mengupayakan dengan menjalin hubungan transaksional dengan beberapa partai tertentu yang akan mencalonkan *nepos*, dan partai lain yang mengajukan pasangan calon bagi *nepos*.

Keenam, ranah tujuan praktik politik nepotisme untuk meningkatkan elektabilitas calon kepala daerah *nepos* dilakukan oleh para aktor utama, khususnya kepala daerah sebagai nepotis, dengan sejumlah tindakan penyalahgunaan kewenangan terhadap sumberdaya publik dan aneka tindakan koruptif lainnya.

Ketujuh, praktik politik nepotisme daerah, baik untuk meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, maupun meningkatkan elektabilitas oleh para aktor utama, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengakibatkan sejumlah bentuk perlawanan masyarakat yang bergeser menurut tingkat toleransi masyarakat, mulai dari: (1) berbagai stigmatisasi negatif terhadap perilaku politik nepotis dan *nepos*, (2) berbagai bentuk resistensi simbolik dan keseharian masyarakat, (3) transaksionalisasi dukungan dan suara oleh warga masyarakat kepada calon kepala

daerah *nepos*, dan akhirnya akhirnya (4) resistensi elektoral dalam bentuk ketidak-sediaan memilih calon kepala daerah *nepos* dalam pemilihan kepala daerah.

B. Implikasi Teoretik dan Kebijakan

1. Implikasi Teoretik

Sebagai implikasi teoretik pertama, berkenaan dengan akibat perilaku elit politik daerah dalam jejaring politik nepotisme daerah. Temuan penelitian ini mendukung pandangan teoretik Offe (2006) dan sejumlah peneliti lain (Fu, Mou, Miller, and Jalette, 2011; Luengo and Valerio, 2007; Monti, Rozza, Zappella, Zignani, Arvidsson, and Poletti, 2013; Newton, 2001; Ganuza and Espin, 2013), yang menyatakan bahwa perilaku politik elit yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkhis mengakibatkan disafeksi politik masyarakat temporer yang memiliki ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah. Beberapa faktor penyebab disafeksi politik, berupa ketidak-puasan atau kekecewaan masyarakat terhadap perilaku elit politik daerah, legitimasi proses politik dan berbagai lembaga politik, serta keluaran berupa kebijakan publik yang dihasilkan oleh proses politik juga dikuatkan oleh temuan penelitian ini.

Implikasi teoretik kedua penelitian ini berkenaan dengan model teoretik praktik politik nepotisme daerah. Penelitian ini menghasilkan dan menawarkan model teoretik substantif baru tentang tiga ranah utama tujuan praktik politik nepotisme dan

pergeseran resistensi masyarakat, dari resistensi simbolik keseharian menuju resistensi elektoral masyarakat. Model teoretik berdasarkan data lapangan (*grounded theory*) penelitian ini mengandung beberapa konsep yang diperkenalkan dan dikembangkan berdasarkan data lapangan (*in vivo concepts*).

Beberapa konsep dimaksud adalah politik nepotisme sebagai fenomena dalam demokrasi lokal, pejabat politik nepotis dan calon pejabat politik *nepos* sebagai aktor-aktor dalam demokrasi lokal, taksonomi penyebab politik nepotisme sebagai komponen anteseden terjadinya fenomena politik nepotisme dalam demokrasi lokal, tipologi tujuan politik nepotisme sebagai bentuk-bentuk tindakan bertujuan praktik politik nepotisme dalam demokrasi lokal, dan heuristika resistensi masyarakat terhadap politik nepotisme yang dilakukan oleh para aktor politik nepotisme dalam demokrasi lokal.

Berkenaan dengan temuan tentang tipologi berdasarkan ranah tujuan politik nepotisme, penelitian ini menghasilkan tiga konsep baru tipe-tipe tujuan politik nepotisme dalam demokrasi lokal, yaitu: (1) tipe tindakan politik nepotisme oleh pejabat politik nepotis untuk meningkatkan popularitas calon pejabat politik *nepos*, (2) tipe tindakan politik nepotisme oleh pejabat politik nepotis untuk mendapatkan legalitas calon pejabat politik *nepos*, dan (3) tipe tindakan politik nepotisme oleh pejabat politik nepotis untuk meningkatkan elektabilitas calon pejabat politik *nepos*.

Pada dasarnya, beberapa konsep tersebut, sejauh latar dan konteks penelitiannya memiliki kemiripan dengan situs penelitian ini, juga memiliki nilai keteralihan (*transferrability*) pada varian-varian lain dari korupsi politik seperti

politik patronase, politik dinasti, politik kolusionis, dan bahkan politik uang. Artinya, baik dalam politik patronase, politik dinasti, politik kolusionis maupun politik uang, senantiasa diarahkan pada tercapainya tiga tujuan bertahap dan saling terkait dalam persaingan pada demokrasi lokal, yaitu: meningkatkan popularitas, mendapatkan legalitas, dan akhirnya meningkatkan elektabilitas calon pejabat politik yang bersangkutan.

Implikasi teoretik ketiga penelitian ini berkenaan dengan resistensi masyarakat terhadap politik nepotisme. Model teoretik yang ditawarkan oleh penelitian ini memoderasi teori kurva J menurut Davies (1962) tentang revolusi yang terjadi bila kesenjangan antara harapan dengan kenyataan sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan menggantinya dengan resistensi elektoral. Bila dan hanya bila praktik politik nepotisme sudah benar-benar dianggap telah melampaui batas toleransi masyarakat, maka masyarakat politik akan melakukan perlawanan. Sifat dasar perlawanan masyarakat terhadap praktik politik nepotisme bergerak secara bertahap, mulai dari meluasnya pemberian stigma negatif terhadap pejabat politik nepotis, calon pejabat politik *nepos*, beserta pihak-pihak yang bekerjasama dalam praktik politik nepotisme tersebut. Selanjutnya, perlawanan meningkat menjadi berbagai bentuk perlawanan simbolik di kalangan masyarakat yang dalam karya-karya tentang resistensi sosial digolongkan sebagai senjata kaum lemah (*weapons of the weak*), sebagaimana digagas oleh Scott (1985).

Pada tahap selanjutnya, perlawanan masyarakat terhadap praktik politik nepotisme yang semakin menyinggung rasa keadilan masyarakat adalah dengan

menolak pemberian dukungan politik secara sukarela kepada calon pejabat politik *nepos*. Karena itu, hubungan antara calon pejabat politik *nepos* dengan pendukung dan masyarakat pemilih menjadi sama sekali transaksional, sehingga mendukung dan memberikan suara bisa ditafsirkan sebagai salah satu cara mendapatkan penghasilan.

Tahap terakhir dari perlawanan masyarakat terhadap praktik politik nepotisme yang semakin melampaui ambang batas toleransi etika publik masyarakat adalah dengan menghukum sekeras-kerasnya calon pejabat politik *nepos* dan pasangan calon pejabat politik *nepos*. Bentuk hukuman paling keras yang dilakukan tidak dalam wujud kekerasan, pemberontakan dan sejenisnya, melainkan dengan menerima segala pemberian pasangan calon pejabat politik *nepos*, tetapi menolak untuk memberikan suara dalam pemilihan pejabat politik daerah. Bila tahap terakhir perlawanan terhadap politik nepotisme berupa resistensi elektoral ini terjadi, maka semua usaha untuk menjamin elektabilitas calon pejabat politik *nepos* menjadi gagal, sedangkan perlawanan masyarakat terhadap politik nepotisme menjadi berhasil.

Dengan demikian, secara teoretik penelitian ini juga berimplikasi menjembatani teori-teori perlawanan simbolik Scott (1985) masyarakat, yang tidak bertujuan mencapai perubahan struktural, dengan teori perlawanan Popkin (1979) yang bertujuan politik. Model teoretik temuan penelitian ini menggambarkan pergeseran baik dalam politik patronase maupun dalam resistensi masyarakat, dari relasi atau resistensi yang bersifat moral dan kultural, menjadi relasi atau resistensi yang bersifat transaksional, rasional serta mengedepankan tujuan politik.

2. *Implikasi Kebijakan*

Selain sejumlah implikasi teoretik tersebut, penelitian ini juga menghadirkan implikasi kebijakan berkenaan dengan kualitas demokrasi, sistem rekrutmen pejabat daerah, dan peran partai politik dalam politik daerah.

Fenomena politik daerah, khususnya dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkan beta longgar norma dan nilai-nilai etika politik daerah. Keleluasaan petahana untuk menggunakan segala kewenangan dan sumberdaya publik menjadikan proses yang jujur dan adil (*fair*) dalam kontestasi politik tidak ditemukan. Isteri pejabat politik petahana, bisa dengan mudah mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah, sedangkan para kader dari partai politik, justru mengalami kesulitan untuk mencalonkan diri. Karena itu, sebagai implikasi kebijakan penelitian ini, direkomendasikan agar diterbitkan aturan yang lebih ketat terhadap pencalonan anggota keluarga pejabat politik petahana, mulai dari derajat pertama hingga derajat ketiga. Secara filosofis, pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak individu, tetapi justru melindungi hak-hak publik dalam politik.

Praktik politik nepotisme, yang senantiasa diikuti dengan praktik nepotisme dalam pemerintahan, mengakibatkan ketidak-adilan dalam rekrutmen pejabat daerah. Pejabat daerah tidak ditetapkan dan diangkat berdasarkan kemampuan, kinerja atau loyalitas terhadap organisasi pemerintahan, tetapi lebih didasarkan pada kedekatan hubungan dan loyalitasnya terhadap pribadi pejabat dan keluarganya. Bila keadaan demikian dibiarkan terus-menerus, maka akan berkembang rasa tak-berdaya (*sense of powerlessness*), karena tidak ada hubungan langsung antara kinerja dengan

penghargaan yang diterima oleh perangkat daerah. Karena itu, sebagai implikasi kebijakan kedua penelitian ini, direkomendasikan agar diterbitkan aturan yang lebih rasional terhadap hubungan isteri/suami kepala daerah dengan birokrasi pemerintah daerah. NGOGO, semacam PKK dan Dharma Wanita, meskipun berperan penting dalam program pembangunan, ternyata memiliki dampak negatif terhadap peningkatan kualitas demokrasi politik daerah. Secara filosofis, pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi partisipasi dan kontribusi isteri/suami pejabat politik dalam penyelenggaraan program pembangunan, tetapi justru untuk mencegah penyalahgunaan sumberdaya publik untuk kepentingan anggota keluarga pejabat politik petahana. Selain itu, juga direkomendasikan agar ketentuan tentang rotasi, mutasi dan promosi pejabat daerah tidak hanya berupa himbauan, melainkan peraturan pemerintah yang benar-benar ditegakkan serta memiliki sanksi hukum dan politik.

Praktik politik nepotisme juga berdampak negatif terhadap sistem pengkaderan dan rekrutmen calon-calon pemimpin dari partai politik. Banyak kader politik yang telah menunjukkan loyalitas, dedikasi, kinerja yang baik dalam partai politik mereka, terpaksa tidak bisa mencalonkan diri karena terkalahkan oleh anggota keluarga dari elit dalam partai politik tersebut. Praktik politik nepotisme juga mengakibatkan perubahan fungsi partai politik menjadi sekedar kendaraan non-ideologis yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki sumberdaya. Secara filosofis, ini akan mengakibatkan partai-partai politik kehilangan fungsi dasarnya dalam agregasi dan artikulasi kepentingan, dan bahkan menjadi perumus

penyelenggaraan negara yang ideal (*good state*). Dengan ungkapan lain, partai politik menjadi kehilangan sifat idealistiknya, kehilangan sifat dasarnya sebagai piranti perjuangan rakyat. Karena itu, direkomendasikan agar dalam diri partai politik sendiri dilakukan proses demokratisasi, sehingga tetap terjaga sistem pengkaderan dan rekrutmen yang fair, yang diharapkan bisa melahirkan para pemimpin politik yang baik yang tetap mempertahankan idealismenya, atau tidak terjebak dalam pragmatisme, dalam menyelenggarakan negara atau pemerintahan daerah.

C. Saran Penelitian Lanjutan

Beberapa saran perlu diajukan untuk penelitian lanjutan terkait dengan topik penelitian ini. Saran-saran diajukan berdasarkan sejumlah keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dengan saran-saran dimaksud temuan dan kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan dan ketepatan keberlakuan lebih baik.

Pertama, salah satu keterbatasan penelitian ini justru dilaksanakan dengan asumsi bahwa bahwa setiap pejabat politik niscaya ingin mempertahankan kekuasaan politik dan meneruskan kekuasaan politik kepada orang dekatnya. Peneliti menyadari bahwa topik penelitian ini telah menempatkan pejabat politik *nepotis* dan calon pejabat politik *nepos* sebagai "*suspect*" salah satu varian korupsi politik. Dengan asumsi demikian, penelitian justru tidak menjadikan pejabat politik *nepotis* dan calon pejabat politik *nepos* sebagai informan utama penelitian. Karena itu, penelitian lanjutan dengan topik yang sama perlu mempertimbangkan disertakannya pejabat politik *nepotis* dan calon pejabat politik *nepos* sebagai informan utama penelitian.

Karena hampir tidak mungkin menggunakan pendekatan terbuka dan terus-terang terhadap pejabat politik *nepotis* dan calon pejabat politik *nepos*, maka agar diperoleh hasil lebih berimbang, disarankan untuk tidak hanya menggunakan cara pengamatan dan wawancara terus terang (*overt observation and interview*), tetapi juga cara pengamatan dan wawancara tersamar (*covert observation and interview*).

Kedua, keterbatasan berikutnya dari penelitian ini terjadi karena situs dan masyarakat penelitian ini memiliki karakteristik khusus. Lokasi dan masyarakat tempat penelitian ini diselenggarakan dikenal tidak hanya merupakan kota pendidikan, dengan berpuluh-puluh perguruan tinggi, sekolah-sekolah yang maju, masyarakat yang relatif terdidik, tetapi juga jaringan komunikasi publik, informasi dan media massa yang luas dan merata. Secara umum, tidak banyak daerah dan masyarakat di Indonesia yang memiliki karakteristik sama dengan lokasi dan masyarakat dalam penelitian ini. Karena itu, untuk menguji apakah karakteristik edukasi, komunikasi dan informasi publik daerah dan masyarakat mempengaruhi dinamika dan keberhasilan resistensi masyarakat terhadap praktik politik nepotisme dalam demokrasi lokal, sangat disarankan untuk melaksanakan penelitian dengan topik yang sama pada daerah dan masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda. Secara hipotetik, daerah dan masyarakat yang memiliki karakteristik edukasi, komunikasi dan informasi publik yang masih terbatas tidak menunjukkan dinamika dan keberhasilan resistensi masyarakat terhadap praktik politik nepotisme dalam demokrasi lokal.

Ketiga, keterbatasan lain dari penelitian ini adalah karena karena topik penelitian yang dikerjakan relatif baru, atau merupakan studi awal tentang politik nepotisme. Konsekuensi logik dari keterbatasan ini adalah belum bisa ditetapkannya sejumlah konsep dan teori yang bisa digunakan sebagai landasan yang kokoh untuk menafsirkan data dan temuan lapangan penelitian ini. Walaupun demikian, melalui proses konseptualisasi dan teorisasi berdasar data lapangan, penelitian ini menghasilkan sejumlah konsep dan model teoretik tentang politik nepotisme. Karena itu, untuk mendapatkan konsep dan model teoretik tentang politik nepotisme yang lebih baik, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan baik dalam bentuk penelitian positivistik yang bertujuan menguji kelayakan model teoretik penelitian ini, maupun dalam bentuk penelitian interpretif yang bertujuan menemukan teori baru dari teori sebelumnya (*discovering new theory from the previous theory*).

Terakhir, keterbatasan berikutnya dari penelitian politik nepotisme ini adalah karena dilaksanakan pada aras (*level*) demokrasi lokal. Secara empirik praktik politik nepotisme tidak hanya terjadi pada demokrasi lokal, melainkan juga pada demokrasi tingkat nasional. Karena itu, penelitian lanjutan yang juga sangat disarankan untuk diselenggarakan adalah sebuah penelitian tentang praktik politik nepotisme oleh para elit politik nasional, dan bila memungkinkan penelitian praktik politik nepotisme dengan pendekatan kajian perbandingan lintas bangsa (*international*).